
**EVALUASI KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH
DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR
MUTIARA BUNDA CILEGON**

*(The Evaluation of Principal's Policy and Leadership in Applying Inclusive Education
in Mutiara Bunda Elementary School)*

Euis Rohayah
SD Mutiara Bunda Cilegon
Teheuis999@gmail.com

Syadeli Hanafi
Teknologi Pembelajaran Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Syadeli@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research was to obtain data on the effectiveness of leadership taken by principals in the implementation of inclusive education. The research was implemented in SD Mutiara Bunda Cilegon. The data of this study is collected by using an in-depth interview. Furthermore, it is completed with documentation study and participant observation. The current study reveals, i.e : 1) faktual condition of principal's policy in applying inclusive education in Mutiara Bunda Elementary School, i.e: a.) Accept new student by employing observation and IQ test by psychologist b.) hire teachers with special education background c.) adapt curriculum for the special need students d.) teaching methods which are adapted based on the student's characteristics e.) inclusive school outonomy finding system f.) school's policy to provide tools and infrastructure which are easy to be used and reached by the special need students. 2) the role of the principal in deciding the policy during the application of the inclusive education in Mutiara Bunda Elementary School, i.e. (a) as the educator in leading teachers to apply inclusive education (b) as the manager in showing the consistency of the principal's management applying inclusive education (c) as the administrator that looks for the finding of the school independently (d) as the supervisor in supervising homeroom teachers and special need supported teachers during the teaching and learning process (e) as the leader in leading and deciding the policies to apply inclusive education (f) as the innovator in developing students and teacher's enthusiasm to reach a success of inclusive education application. Lastly, some suggestions are proposed in this study, i.e : (1) it is hoped that all parents support all policies made by the principal, (2) teachers are nedded to understand the student's characteristics (3) City and Province Education officials are recommended to concern and socialize the inclusive education system and support all programs related to it.

Keywords : Policy Evaluation, Principal's Leadership, Inclusive Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang efektivitas kepemimpinan yang diambil kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Mutiara Bunda Cilegon. Teknik pengumpulan data utama adalah *in depth interview* kemudian dilengkapi dengan *documentation study* dan *participant observation*. Dari penelitian ini, diperoleh temuan-temuan tentang : 1). Kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Cilegon yaitu: a. penerimaan peserta didik melalui tahapan observasi dan tes IQ oleh psikolog b. merekrut guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa c). penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus d). Metode mengajar disesuaikan dengan karakteristik anak, e). Pendanaan sekolah inklusif berjalan secara mandiri e). sarana dan prasarana adalah mendirikan beberapa bangunan yang mudah dijangkau 2). Peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Cilegon yaitu: a). sebagai educator, melakukan pembinaan kepada guru tentang pendidikan inklusif b) sebagai manajer adalah konsistensi manajemen kepala sekolah dalam pendidikan inklusif, c). sebagai administrator adalah secara mandiri dalam pendanaan pendidikan inklusif d). supervisor adalah menilai guru dan pendamping anak

berkebutuhan khusus e). sebagai leader adalah memimpin dan pengambil kebijakan dalam melaksanakan pendidikan inklusif f). sebagai inovator adalah memberikan keantusiasan peserta didik dan guru dalam menyukseskan pendidikan inklusif. Beberapa saran dalam penelitian ini adalah : (1) Diharapkan semua orang tua mendukung semua kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, (2) Diupayakan guru-guru lebih memahami karakteristik peserta didik, (3) Direkomendasikan kepada dinas pendidikan kota/kabupaten dan provinsi agar memberikan perhatian dan mensosialisasikan hingga ke berbagai kota dan daerah terkait pendidikan inklusif dan mendukung program yang terkait dengan pendidikan inklusif.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pendidikan Inklusif.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang *disabilitas*, terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamanca tentang pendidikan Kebutuhan khusus (UNESCO,1994). Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa: sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahas minoritas dan serta anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement,1994).

Bagi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sekolah inklusif, terutama mengembangkan budaya organisasi yang inklusif, mendorong kinerja guru lebih tinggi, memotivasi guru, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak (orang tua, para ahli, dan *stake holder* lainnya). Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menerjemahkan kebijakan dari pimpinan lebih tinggi sesuai dengan visi misi dan sasaran sekolah yang mengacu kepada sumber daya di dalam dan luar sekolah. Kepala sekolah dengan otonomi yang lebih luas memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pengembangan sekolah. Karena itu, kebijakan pengembangan sekolah perlu dipahami agar formulasi kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai kualitas unggul

dalam proses kegiatan dan lulusan yang sesuai harapan masyarakat.

Fenomena yang ditemukan dilapangan, tepatnya di Sekolah Mutiara Bunda di Kota Cilegon ini adalah, telah menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2004 lalu menjadikan Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon tidak patah semangat untuk tetap konsisten dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon lebih berusaha sendiri untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda ini berjalan dengan baik, diantaranya terlihat adanya sikap penerimaan dari semua masyarakat sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut pun sangat terbuka, sarana dan prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus, dan penyesuaian kurikulum peserta didik berkebutuhan khusus yang dibuat fleksibel.

Berangkat dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam secara sistematis mengenai “Evaluasi Kebijakan dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam melaksanakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon“. Sehingga kepemimpinan kepala sekolah ini mampu mendorong partisipasi dari sekolah-sekolah lainnya agar bisa melaksanakan sekolah inklusif secara bersama-sama dan optimal, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah lebih baik lagi, khususnya kota Cilegon.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, selanjutnya diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana kebijakan kepala Sekolah dalam melaksanakan pendidikan Inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon?
- b. Apa fungsi dan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam pengambilan

kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon?

- c. Bagaimana rancangan desain Evaluasi kebijakan dan Kepemimpinan Kepala Sekolah berdasarkan hasil kajian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang efektivitas kepemimpinan yang diambil kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- Mendeskripsikan kebijakan kepala sekolah pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon
- Mendeskripsikan fungsi dan peran kepala Sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon
- Membuat rancangan desain evaluasi kebijakan dan kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan hasil kajian peneliti dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon.

B. KAJIAN TEORETIK

1. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan seterusnya.

Menurut William. M. Dunn (2003: 608) mendefinisikan sebagai berikut: "Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan ketika hasil kebijakan pada akhirnya mempunyai nilai."

Menurut Nanang Fattah (2012: 250) evaluasi kebijakan "merupakan aktivitas yang dirancang untuk menilai keuntungan dari suatu kebijakan atau program yang telah dibuat".

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

2. Kepemimpinan

Definisi Kepemimpinan menurut Sudadio (2013:18) "Kepemimpinan yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok".

Definisi Kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (2011: 17) "Kepemimpinan diterjemahkan kedalam istilah: sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh".

Teori jenis kepemimpinan menurut Sudarwan Danim (2010: 7), yaitu:

- Teori genetis.** Teori ini sering disebut *the great man theory*. Teori ini berasumsi bahwa kapasitas kepemimpinan itu bersifat inborn, bahwa pemimpin besar (*great leader*) dilahirkan, bukan dibuat (*leader are born, not made*).
- Teori sifat.** Serupa konsepsinya dengan teori "Great Man", teori sifat (*traits theory of leadership*) mengasumsikan bahwa manusia yang mewarisi sifat-sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok untuk menjalankan fungsi kepemimpinan.
- Teori Kontingensi.** Teori-teori kepemimpinan kontingensi (*contingency theory of leadership*) memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan dengan lingkungan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk situasi yang cocok pula.
- Teori situasional.** Teori kepemimpinan situasional (*Situational theory of leadership*) mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional.
- Teori Perilaku.** Teori perilaku kepemimpinan (*behavioral theory of leadership*) didasari pada keyakinan bahwa pemimpin yang hebat merupakan hasil bentukan, atau dibentuk bukan dilahirkan (*leader are made, not born*).

- f. **Teori Partisipatif.** Teori-teori kepemimpinan partisipatif (*Participative theory of leadership*) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah mengambil prakarsa bagi pelibatan orang lain, sehingga pada setiap pembuatan keputusan, antara pemimpin dan pengikutnya, seperti memiliki rekening bersama, meski jumlah uang yang disetor pada rekening itu, tidak harus bahkan tidak boleh selalu sama.
- g. **Teori transaksional.** Teori ini sering disebut juga sebagai teori-teori manajemen (*management theories*). Teori transaksional (*transactional theory of leadership*) berfokus pada peran pengawasan, organisasi dan kinerja kelompok.
Gaya Kepemimpinan menurut Teori Kurt Lewin dalam Sudarman Danim (2010: 9)
- a. **Kepemimpinan otoriter (*autocratic leadership*).** Pemimpin otoriter memberikan ekspektasi yang jelas apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana hal itu harus dilakukan.
- b. **Kepemimpinan partisipatif (*democratic leadership*).** Pemimpin demokratis menawarkan bimbingan kepada anggota sekaligus juga berpartisipasi dalam kelompok dan memungkinkan menerima masukan dari anggota kelompok lainnya.
- c. **Kepemimpinan delegatif (*delegative or laissez-faire leadership*).** Pemimpin delegatif sedikit atau tidak memberikan bimbingan kepada anggota kelompok dan mendelegasikan pembuatan keputusan sampai ke anggota kelompok.
Menjadi seorang pemimpin secara alami hanya memerlukan seseorang untuk berhenti berusaha menjadi orang lain. Pemimpin yang efektif mulai dari diri sendiri. Pelatihan kepemimpinan diperlukan untuk memungkinkan orang untuk bisa bekerja paling efisien dan efektif dan posisinya untuk meningkatkan kekuatan yang alami dalam rangka memenuhi tujuannya.

3. Kepala Sekolah

Menurut Wahjosumidjo (2003: 358) mengartikan bahwa: ‘ Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi

tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Menurut Rahman dkk dalam Sri Damayanti (2008) mengungkapkan bahwa “ Kepala Sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di sekolah”.

Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah memiliki tugas-tugas yang harus dijalankannya. Adapun tugas-tugas kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2003: 97) antara lain sebagai berikut :

- Kepala Sekolah bekerja dengan dan melalui orang lain, pengertian orang lain tidak hanya para guru, staf, siswa dan orang tua siswa, melainkan termasuk atasan kepala sekolah, para kepala sekolah lain serta pihak-pihak yang berhubungan dan bekerja sama.
- Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan.
- Dengan waktu dan sumber yang terbatas, kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan.
- Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konseptual.
- Kepala Sekolah adalah seorang mediator dan juru penengah.

Dalam paradigma pendidikan manajemen pendidikan, kepala sekolah harus mampu menjadi sebagai edukator, manajer, administrator, leader, supervisor, inovator dan motivator.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Cilegon, Jl. Boulevard Raya Blok A2 No 6 Taman Cilegon, Kota Cilegon Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik Pengolahan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (Penyajian data), display data (pengelompokkan data) dan verifikasi data (pemaknaan data).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Faktual kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Cilegon

- a. Kebijakan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus
Kepala sekolah sebagai pemberi keputusan berhak membuat kebijakan terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolahnya. Apakah masuk ke sekolah tersebut melalui tes atau tanpa tes, ataukah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi ketika penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus ini.
- b. Kebijakan kepala sekolah dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan
Sebagai kepala sekolah SH memiliki kebijakan untuk menerima tenaga pendidik yang akan mengajar. SH memiliki tenaga guru yang berlatarbelakang pendidikan khusus sehingga memudahkan SH untuk berkoordinasi dalam melaksanakan pendidikan inklusif
- c. Kebijakan kepala sekolah terhadap penyesuaian kurikulum peserta didik berkebutuhan khusus
Kurikulum yang digunakan di Sekolah Mutiara Bunda adalah Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disesuaikan dengan kemampuan siswa secara fleksibel.
- d. Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Kegiatan Pembelajaran pada Seting Pendidikan Inklusif
Banyak sekali metode atau pendekatan dalam pembelajaran,

tetapi tidak semua metode atau pendekatan tersebut dapat diterapkan, apalagi mengakomodir semua kebutuhan atau cara belajar anak. Dalam pendidikan inklusif, pendekatan dalam pembelajaran sangat diperhatikan, karena disini bagaimana guru di kelas dapat membuat siswa merasa senang, tenang, aman dan nyaman ketika pembelajaran berlangsung.

- e. Kebijakan Kepala Sekolah dalam pendanaan pendidikan inklusif Sekolah Dasar Mutiara Bunda merupakan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mandiri. Dalam pendanaan untuk melaksanakan pendidikan inklusif, kurang adanya bantuan dana dari pemerintah, sehingga kepala sekolah berusaha mengatur dana yang didapat dari orang tua siswa untuk seluruh kegiatan sekolah.
- f. Kebijakan kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif Sekolah Dasar Mutiara Bunda memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal ini tidak terlepas dari usulan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan belajar dan bermain anak berkebutuhan khusus.

2. Peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon

- a. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai Educator dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah selain menjadi pemimpin kepala sekolah juga turut mengajar menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
- b. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai manajer dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kepala sekolah memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan

- penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- c. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai adminidtrator dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah memiliki kebijakan terkait administrasi sekolah
 - d. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai supervisor dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kepala sekolah duduk di kelas untuk melihat bagaimana cara guru mengajar di kelas, hal ini lakukan untuk melihat kemampuan guru dalam mengajar, terutama pada penyelenggaraan pendidikan inklusif,
 - e. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai leader dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah Kepala sekolah sebagai seorang leader atau pemimpin di sekolah, tentu memiliki kemampuan dalam memimpin, memberikan petunjuk melakukan pengawasan sampai dengan membuat sebuah keputusan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon.
 - f. Kebijakan Kepala Sekolah sebagai inovator dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kepala sekolah memegang peranan penting dalam menciptakan inovasi-inovasi baru disekolahnya, sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklkusif di Kota Cilegon
 - g. Kepala sekolah sebagai seorang motivator memiliki peranan yang besar dalam memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.
3. **Rancangan Desain Kebijakan Kepala Sekolah berdasarkan Hasil Kajian Peneliti dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon**

Desain kebijakan yang disusun ini merupakan desain kebijakan berdasarkan hasil analisis peneliti di lapangan. Desain ini disusun berdasarkan agenda kebijakan yaitu kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Desain kebijakan ini mengacu pada tiga aspek yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya tiga aspek tersebut di visualisasikan dalam bentuk bagan dibawah ini

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan, maka dapat dirumuskan kesimpulan terkait kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda kota cilegon sebagai berikut :

1. **Kondisi Faktual Kebijakan Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon**
 - a. Kebijakan kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik adalah dengan dilakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan apakah peserta didik berkebutuhan khusus atau tidak.
 - b. Kebijakan kepala sekolah dalam perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan adalah Sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon memiliki satu orang guru berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus, lulusan SMA untuk pendamping anak berkebutuhan khusus dan dari lulusan S1 berbagai jurusan untuk guru kelas.
 - c. Kebijakan kepala sekolah dalam penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus yaitu memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada guru kelas untuk memberikan materi dan membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan anak.
 - d. Untuk kegiatan pembelajaran pada seting pendidikan inklusif

- menggunakan metode-metode mengajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
- e. Kebijakan kepala sekolah dalam pendanaan pendidikan inklusif adalah secara mandiri yang dikumpulkan dari orang tua siswa.
 - f. Kebijakan kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana adalah mendirikan beberapa bangunan dan perbaikan infrastruktur yang mudah dijangkau dan digunakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

2. Peran Kepala Sekolah dalam pengambilan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda kota Cilegon

- a. Peran kepala sekolah sebagai educator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan melakukan pembinaan kepada guru tentang pendidikan inklusif dan memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pendidikan inklusif setiap tahunnya.
- b. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pada konsistensi kepala sekolah dalam menjalankan pendidikan inklusif di Sekolah dasar Mutiara Bunda Kota Cilegon, tentunya untuk menyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan manajemen yang baik, disinilah peran kepala sekolah sebagai seorang manajer
- c. Peran kepala sekolah sebagai administrator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- d. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah mengawasi dan menilai kinerja para guru dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan

- inklusif di Sekolah Mutiara Bunda Kota Cilegon.
- e. Peran kepala sekolah sebagai leader dalam pengambilan kebijakan pembahasan terkait peran kepala sekolah sebagai leader adalah konsistensi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang merupakan kebijakan yang diambil kepala sekolah sebagai seorang pemimpin.
 - f. Peran kepala sekolah sebagai innovator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah upaya dari kepala sekolah untuk memberikan semangat baru dan keantusiasan para peserta didik serta guru dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara bunda Kota Cilegon.
 - g. Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif mengadakan studi banding kesekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif didaerah lain.

Saran

1. Bagi Orang Tua
Diharapkan kepada semua orang tua dari peserta didik pada umumnya dan peserta didik berkebutuhan khusus memiliki sikap penerimaan untuk dapat menerima semua kekurangan yang ada pada di setiap peserta didik.
2. Bagi Guru
Diupayakan semua guru-guru dapat lebih memahami semua karakteristik peserta didik.
3. Bagi Kepala Sekolah
Kepala Sekolah harus lebih giat dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Mutiara Bunda Kota cilegon dan dapat bekerja sama dengan semua komponen-komponen pelaksana pendidikan inklusif,
4. Bagi Dinas Pendidikan
Diharapkan agar segera mensosialisasikan hingga ke berbagai kota dan daerah terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Danim, S. 2011). *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- David Smith, J. 2013. *Sekolah Inklusi*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2006. *Manajemen Sekolah Dalam Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Dunn, W. 2003 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fattah, N. 2012 *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*.
- Kustawan, D. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media
- Moleong, L, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa, E. 2011. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E 2012. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Miftahudin 2009. *Evaluasi Kebijakan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)*. (Tesis). Sps. Undip
- Paerunan, I 2011. *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X, Y, dan Z Kota Jayapura*. (Tesis) Sps. UPI
- Permendiknas. (2009). No. 70 Tahun 2009. *Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Khusus*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rahardja, D. 2011. *Penerapan Konsep-Konsep Bimbingan dan Konseling dalam Pembelajaran dan Layanan Bimbingan bagi Siswa Tuna Netradi Sekolah Penyelenggara Perintis Pendidikan Inklusif*. (Desertasi) PPs. UPI
- Rohiyat. 2008 *Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Refika Aditama
- Rusyan, T. 2002 *Profesionalisme Kepala Sekolah*, Jakarta: Pustaka Dinamika
- Sudadio, 2013 *Dimensi Esensial Manajemen Peningkatan Mutu Jasa Pendidikan dan Pelatihan*.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Sedarmayanti. 2011 *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Styawan, W.B 2008 *Evaluasi Proses Pelaksanaan Program Pengembang Kecamatan (PPK) di Kecamatan Karangmejo Kabupaten Gunungkidul*. (Tesis) Sps.Undip
- Taufan, J 2013 *Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi*. (Tesis) Sps. UPI

Usman, H. 2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Untirta (2014). Buku Pedoman Penulisan Tesis.

Wahjosumidjo. 2003. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2005 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Wirawan, (2013). *Kepemimpinan (Teori Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada